

**MEMBANGUN KEMBALI PARIWISATA YOGYAKARTA:
STRATEGI DAN UPAYA PEMERINTAH MELALUI
BADAN TOURISME (BATOUR) 1954-1959**

***REBUILDING YOGYAKARTA TOURISM: GOVERNMENTAL
STRATEGIES AND EFFORT THROUGH THE TOURISM AGENCY
(BATOUR) 1954-1959***

Hasbi Marwahid

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424
Email: hasbimarwahid@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v8i1.309

*Naskah Diterima: 28 Desember 2021 Naskah Direvisi: 13 Mei 2022
Naskah disetujui: 13 Mei 2022*

Abstrak

Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia. Hal ini karena dukungan dari pelbagai faktor seperti sejarah dan kebudayaannya. Pembangunan pariwisata di Yogyakarta sekarang tentu tidak lepas dari upaya-upaya awal pemerintah dalam mengembangkannya pasca kemerdekaan. Pembangunan pariwisata seiring dengan upaya pemerintah memulihkan perekonomian daerah yang rusak pasca perang. Artikel ini berfokus pada strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun kembali pariwisata di Yogyakarta. Sumber yang digunakan meliputi arsip pemerintah, koran, dan majalah sezaman. Dengan menggunakan metode sejarah, hasil dari kajian ini menunjukkan keterlibatan aktif dari pemerintah telah berhasil membangkitkan kembali pariwisata yang ada di Yogyakarta dengan adanya kebijakan, koordinasi, subsidi dan pendirian sebuah badan yang mengelola.

Kata Kunci: Sejarah Pariwisata, Pasca revolusi, Badan Tourisme, Yogyakarta.

Abstract

Yogyakarta is one of the leading tourist destinations in Indonesia. This is because of the support of various factors, such as history and culture. The development of tourism in Yogyakarta today cannot be separated from the government's initial efforts to develop it after independence. Development is in line with the government's efforts to revive the regional economy damaged after the war. This article focuses on the strategies and efforts made by the local

government to rebuild tourism in Yogyakarta. Sources used include government archives, newspapers, and contemporary magazines. Using the historical method, the results of this study show that the active involvement of the government has revived tourism in Yogyakarta with policies, coordination, and the establishment of an agency that manages tourism.

Keywords: *history of tourism, post-revolution, tourism agency, Yogyakarta.*

PENDAHULUAN

Pariwisata secara umum merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup, dan menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya (Wahab, 1992: 5). Pariwisata juga memberi rangsangan dan sumbangan secara langsung kepada pembangunan maupun perbaikan transportasi, akomodasi, program-program budaya, kebersihan, maupun kelestarian lingkungan hidup (Pendit, 1990: 8). Pada penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pariwisata merupakan hubungan yang muncul dari adanya interaksi wisatawan, pelaku bisnis, pemerintah, masyarakat, dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta pengunjung lainnya di sebuah daerah tujuan wisata.

Pariwisata secara luas di Yogyakarta telah dimulai sejak pertengahan abad 19, dengan adanya kedatangan para pelancong untuk melihat bangunan bersejarah, arkeologi, pemandangan alam, dan budaya (Yoeti, 2006: 331). Pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda membentuk *Vereneiging Touristen Verker* (VTV) yang kemudian berperan cukup penting dalam pengembangan dan perluasan jaringan pariwisata (Sunjayadi, 2007: 32). Pulau Jawa kemudian ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata ke Hindia Belanda karena telah memiliki infrastruktur yang cukup memadai seperti jalur pelayaran pelabuhan, rel kereta api, dan sebagainya (Cribb, 1995: 196-197). Kawasan yang dipromosikan bagi para wisatawan pada saat itu antara lain Batavia, Buitenzorg, Garut, Bandung, Sukabumi, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Pasuruan (Tourism in Netherland India, 1929). Yogyakarta masuk dalam pelbagai promosi yang dilakukan pemerintah maupun swasta

pada saat itu, baik dalam paket-paket perjalanan wisata maupun publikasi-publikasi lainnya (*Tourism in Netherland India*, 1938).

Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata yang berkembang di Indonesia pada saat itu sudah terkoordinir dengan baik. Akan tetapi, pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan membuat aktivitas pariwisata terhenti (Yoeti, 1996: 37). Pasca kemerdekaan, pemerintah berusaha menyusun kebijakan dan membentuk lembaga untuk melanjutkan kembali pariwisata di Indonesia (Spillane, 1987: 64-67). Pembangunan pariwisata pada dekade ini dihadapkan dengan pelbagai permasalahan seperti dalam ranah kebijakan, sumber daya manusianya, dan pelbagai aset-aset penunjang pariwisata seperti transportasi dan akomodasi yang kondisinya cukup memprihatinkan¹ (ANRI No. 1716). Keadaan ini tentu berdampak pada perkembangan dan pelayanan pariwisata yang ada di Indonesia.

Kajian tentang sejarah pariwisata di Indonesia sudah banyak diteliti, mulai dari masa kolonial maupun pada masa Orde Baru. Sunjayadi (2007; 2019) membahas organisasi dan perkembangan pariwisata yang terjadi pada masa kolonial. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang dipromosikan dan banyak mendapat kunjungan dari wisatawan. Wardiyanta (2000) menguraikan terkait dengan dinamika pariwisata yang ada di Yogyakarta pada masa kolonial. Dahles (2011) membahas terkait dengan perkembangan dan kemajuan pariwisata yang ada di Yogyakarta pada masa Orde Baru.

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa pariwisata yang ada di Yogyakarta sudah diatur dan dikelola dengan baik. Pembahasan tentang pariwisata pada tahun 1950-an yang ada lebih banyak berkisar dipembentukan

¹ ANRI, Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI tahun 1950-1959 No. 2238 berisi tentang laporan dari Lars Hille Esmark pada tahun 1956. Lars Hille Esmark merupakan seorang ahli yang diminta oleh Biro Perancang Negara Mr. Ali Budiarjo kepada PBB untuk meninjau keadaan turisme dan perhotelan di Indonesia. Dalam pengamatannya selama kurang lebih 6 bulan, Esmark menghasilkan laporan "*Development of Foreign Tourism in Indonesia*". Laporan tersebut merupakan working paper yang digunakan oleh pemerintah untuk memajukan turisme di Indonesia.

lembaga atau organisasi pariwisata di tingkat nasional dan belum banyak menyentuh pada tingkatan lokal (Kodhyat, 1996; Simanjuntak, 2017). Penelitian terkait dengan pembangunan pariwisata pada tahun 1950-an dilakukan oleh Vickers (2011). Penelitian ini menguraikan pembangunan pariwisata ditingkat lokal dengan fokus di Pulau Bali.

Pada kajian ini berfokus pada pembangunan pariwisata pasca perang kemerdekaan dan belum banyak literatur yang mengulas terkait dengan hal tersebut khususnya di Indonesia. Reddy dan Boyd et.al (2020) mengemukakan bahwa pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah harus dapat mengeksplorasi pelbagai strategi untuk membangun kembali pariwisata pasca krisis. Hal ini karena krisis baik itu perang, konflik maupun pandemi sangat mengganggu berlangsungnya pariwisata akan tetapi juga menjadi peluang bagi pembangunan dan perkembangan pariwisata. Yamamura dan Seaton (2022) mengemukakan perjalanan pariwisata mengunjungi daerah atau situs terkait dengan konflik masa lalu pada dasarnya merupakan ziarah yang memperkuat identitas politik maupun pribadi dari sebuah bangsa. Pada konteks ini, citra Yogyakarta pada tahun 1950-an dibangun berdasarkan perannya pada masa perang kemerdekaan, baik sebagai Ibukota Negara maupun tempat yang menentukan bagi kelangsungan Republik yang baru berdiri.

Perkembangan sejarah yang terjadi tidak akan pernah melompat pada sebuah ruang kosong. Selalu terdapat kontinuitas yang terjadi pada setiap masanya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Hal ini tentu juga berlaku dalam perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia. Maka dari itu, studi ini berusaha mengulas pembangunan kembali pariwisata yang ada di Yogyakarta terutama pada tahun 1950-an. Ruang lingkup studi ini difokuskan pada cara membangun kembali pariwisata yang dilakukan oleh agen yang merupakan pemerintah daerah maupun Sultan Hamengkubuwana IX sebagai kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan dorongan atau pergerakan (*boosterism*) yang ditawarkan oleh Getz (1987).

Menurut Getz, boosterisme merupakan suatu pendekatan sederhana yang melihat pariwisata memberikan manfaat positif bagi suatu tempat dan

penghuninya. Objek-objek yang terdapat di suatu lingkungan dalam hal ini adalah sumber daya alam dan budaya dianggap sebagai objek yang akan dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata dan ditawarkan sebagai aset bagi pengembangan kepariwisataan. Sebagaimana dikemukakan oleh Cooper dan Hall (2008), bahwa pemerintah sebagai sektor publik memiliki tugas atau peran koordinasi (*coordination*), perencanaan (*planning*), undang-undang dan peraturan (*legislation and regulation*), pengusaha atau entrepreneur, stimulasi (*stimulation*), peran pariwisata sosial (*social tourism*) dan peran sebagai daya tarik bagi publik (*public interest*).

Kajian ini cukup relevan pada masa sekarang terkait dengan era otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah untuk menggali potensi, kreativitas, kemandirian suatu daerah dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Adissya dan Budi: 2019; 150). Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerahnya sebagai sumber penerimaan daerah menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut. Pada saat itu, Yogyakarta merupakan daerah istimewa berotonomi khusus setingkat provinsi berdasarkan UU. No. 3 tahun 1950 (Poerwokoesome: 1984, Soewarno: 1994). Sebagai daerah otonomi, pemerintah daerah tentu dituntut untuk memaksimalkan potensi daerah sebagai wujud kemandiriannya dan tidak bergantung dengan pemerintah pusat.

Pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah pada dekade ini merupakan salah satu upaya dalam memperbaiki keadaan ekonomi di Yogyakarta pascaperang. Hal ini karena pariwisata menjadi satu-satunya sektor yang sudah tersedia dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Jadi, pemerintah daerah berusaha merevitalisasi sisa-sisa sumber perekonomian daerah yang ada dan mengembangkannya. Maka dari itu, studi ini cukup penting untuk melihat bagaimana pariwisata dibangun kembali, dikembangkan, dan dikelola di Yogyakarta pasca perang kemerdekaan. Selain itu, kajian ini juga berusaha untuk melengkapi studi-studi sebelumnya dan

menambah khasanah historiografi tentang pariwisata di Indonesia khususnya pada tahun 1950-an ditingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 2008: 42). *Pertama*, adalah tahapan heuristik. Pada tahapan ini penulis mengumpulkan sumber atau primer dan sekunder untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Sumber Primer didapatkan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yaitu pada Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI tahun 1950-1959, Inventaris Arsip Perdana Menteri RI (PMRI), dan Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri. Sumber primer lainnya didapatkan di Badan Perpustakaan dan Arsip daerah (BPAD) DIY terutama pada koleksi Jawatan Pemerintahan Umum (JPU), Arsip Kraton Yogyakarta, Arsip Pakualaman, dan serta koleksi langka di Perpustakaan Nasional RI. Kajian ini juga menggunakan surat kabar dan majalah sezaman seperti *Kedaulatan Rakyat (KR)*, *Nasional*, majalah *Minggu Pagi* dan *Kalawarti*. Tahap *Kedua* melakukan kritik terhadap sumber yang didapatkan. Proses kritik sumber merupakan tahapan yang dilakukan untuk memverifikasi keaslian dan kredibilitas sumber (nilai pembuktian), serta untuk melihat relevansi sumber terhadap penelitian. Tahap *Ketiga* yaitu interpretasi yang merupakan tahapan untuk memaknai temuan dari proses heuristik dan kritik serta melihat keterkaitan antara satu komponen dan komponen lainnya. *Terakhir*, historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini juga digabungkan fakta-fakta yang kemudian dideskripsikan secara kronologis dan ilmiah. Sehingga pada akhirnya tersusun sebuah tulisan yang sistematis dan komprehensif dengan menggunakan referensi yang memiliki tingkat kredibilitas yang tepat.

PEMBAHASAN

Badan Tourisme (Batour) membangun kembali puing Pariwisata

Pada dasarnya, urusan kehotelan dan turisme sudah diatur dalam UU. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada Undang-undang tersebut terdapat penambahan urusan terutama kepada Jawatan Pemerintahan Umum (JPU) yaitu kehotelan dan turisme.² Namun, sejak diberlakukannya undang-undang tersebut dari tahun 1950 sampai tahun 1954-an, urusan kehotelan dan turisme belum dikelola dengan baik. Hal ini tentu juga berimbas terhadap pelayanan bagi para wisatawan yang datang. Berawal dari keadaan tersebut membuat beberapa orang dari pemerintahan memikirkan untuk mengembangkan pariwisata sekaligus melaksanakan amanat undang-undang.

Pada tanggal 17 Juli 1954, Bupati Gunung Kidul K.R.T Brataningrat menyampaikan usulan tentang pengembangan pariwisata Yogyakarta kepada DPRD DIY (BPAD DIY No. 3146). Usulan tersebut mengulas potensi dan manfaatnya jika turisme dikembangkan di Yogyakarta. Usul tersebut dengan cepat ditanggapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dengan keluarnya Surat Keputusan No. 15/K./DPR/1954 tentang penyelenggaraan urusan turisme di Yogyakarta. Persoalan penyelenggaraan turisme kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera dilaksanakan bekerjasama dengan pihak swasta dan instansi pemerintahan yang terkait.

Pada keputusan tersebut mendesak Pemerintah Daerah untuk segera membuat sebuah kantor atau organisasi turisme di dalam pemerintahan sebagai penggerak utamanya. Posisi pengelola turisme tersebut berada di bawah pimpinan Jawatan Pemerintahan Umum (JPU) dan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi. Keputusan ini menjadi landasan awal pembangunan turisme pasca kemerdekaan di Yogyakarta.

Pasca keputusan tersebut, pemerintah daerah segera menginventarisir objek-objek yang potensial dijadikan tempat wisata dan mengadakan pelbagai

² Lihat U.U No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan penyempurnaan dari U.U No. 3 tahun 1950.

pertemuan antar jawatan di pemerintahan. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 10.000,- kepada JPU untuk keperluan pengembangan turisme di Yogyakarta (KR, 1955). Kepala JPU K.R.T Dipodiningrat juga mengirim surat kepada pemerintah pusat melalui Panitia Penyelenggara Tourisme yang diketuai oleh Nazir Datuk Pamuncak tentang pendirian sebuah organisasi yang mengurus turisme di daerah-daerah. Namun, pemerintah pusat belum mempunyai badan pengelola yang khusus untuk mengurus persoalan turisme (BPAD DIY No. 3144 dan ANRI No. 3218).

Tugas dari Panitia Penyelenggara Turisme hanya memberi saran dan laporan kepada Perdana Menteri untuk tujuan membentuk organisasi tersebut (ANRI No. 474). Pembentukan organisasi yang mengurus pariwisata di Yogyakarta mulai menemui titik terang setelah Sultan Hamengkubuwana IX bertemu dengan Menteri Muda (wakil) Perhubungan yaitu Asrarudin pada kunjungannya di Yogyakarta. Pada pertemuan tersebut Sultan berkonsultasi terkait dengan pembentukan organisasi yang menyelenggarakan turisme di Yogyakarta. Asrarudin menyarankan bentuk dari organisasi turisme ini dibuat seperti *Naamloze vennootschap* (N.V) setengah resmi, di mana pemerintah tetap ikut mengurus organisasi tersebut. Selain itu, disarankan mengadakan koordinasi dengan Jawa Tengah supaya lebih mudah dalam mengaturnya (BPAD DIY No. 3124).

Berpijak pada hasil pertemuan tersebut, kemudian Sultan sebagai kepala pemerintah daerah DIY menginisiasi rapat pembentukan sebuah organisasi yang menangani turisme dengan mengundang para Residen di seluruh Jawa Tengah. Rapat tersebut berlangsung pada tanggal 8 Desember 1955 di Kepatihan Yogyakarta. Pada rapat itu berhasil memutuskan pembentukan Badan Tourisme Jawa Tengah (Batour) yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwana IX dengan K.R.T Honggowongso sebagai sekretarisnya dan berpusat sementara di Yogyakarta. Sementara di Karesidenan Jawa Tengah dan Yogyakarta dibentuk cabang badan turisme yang dipimpin oleh Residen dan di Yogyakarta sendiri dipimpin oleh Wakil Kepala Daerah yaitu Paku Alam VIII.

Kemudian pada setiap Kabupaten di Jawa Tengah dan Yogyakarta dibentuk ranting badan turisme yang dikoordinatori oleh Bupati (BPAD DIY No. 3124).

Tujuan dari Batour ini adalah untuk mengembangkan turisme di Jawa Tengah dan DIY dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu mendorong supaya segera terbentuk badan atau lembaga resmi dari pemerintah pusat dalam urusan pengelolaan turisme. Sebelum terbentuknya badan atau lembaga dari pemerintah pusat, maka Batour Jawa Tengah dan DIY akan menyelenggarakan kegiatan turisme luar dan dalam negeri. Pertemuan Batour Jawa Tengah dan DIY beberapa kali dilakukan untuk mengkoordinasikan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan turisme tersebut. Pertemuan tersebut diadakan tiap bulan sekali di beberapa tempat di keresidenan Jawa Tengah sembari meninjau objek turisme yang potensial di daerah tersebut (KR, 1956).

Pada tahun 1957 dilangsungkan Musyawarah Nasional Turisme I yang berlangsung di Bogor. Musyawarah nasional ini berhasil membentuk Dewan Turisme Indonesia (DTI) yang kemudian diakui dan disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dengan dikeluarkan S.K No. H2/2/21 (ANRI No. 1265). Pada surat keputusan tersebut, pemerintah mengakui DTI merupakan satu-satunya badan swasta yang bersifat non-komersial dan bertugas sebagai wakil dari badan, lembaga, yayasan untuk membantu pemerintah dalam mengurus persoalan dan perkembangan kepariwisataan nasional.

Dengan terbentuknya DTI tersebut, maka semua organisasi atau badan turisme yang berada di daerah secara langsung menjadi cabangnya dan berada di bawah pengawasan DTI. Badan turisme di Jawa Tengah dan Yogyakarta masuk menjadi cabang dari DTI dan tetap menggunakan nama Badan Turisme (Batour). Pada bulan Agustus 1957, Batour cabang Yogyakarta memisahkan diri dengan Batour Jawa Tengah dan berdiri sendiri. Pemisahan ini terkait dengan rencana subsidi dari Kementerian Perhubungan kepada DTI dan supaya Batour lebih leluasa dalam mengembangkan turisme di Yogyakarta.

Meski sudah berjalan dengan baik, namun status Batour cabang Yogyakarta sebagai badan yang mengelola turisme di daerah ini masih belum

tetap dan masih dalam tahap mencari pengalaman. Ketua dari Batour ini adalah Paku Alam VIII yang juga menjadi wakil DPD DIY, dibantu oleh para pegawai JPU sebagai pelaksananya. Pada pelaksanaannya, pasca terbentuknya DTI, Batour berada dibawah pengawasan DPD DIY dan juga DTI. Keadaan tersebut menjadi janggal karena Batour harus bertanggung jawab kepada dua pengawasan sekaligus. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik kepentingan terkait dengan keputusan-keputusan yang dijalankan oleh kedua belah pihak.

Pada tahun 1958, melalui Surat Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan DIY No. 10/1958 dibentuk Panitia Urusan Turisme DIY (BPAD DIY No. 3139). Tugas panitia ini mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan turisme dan mengajukan rancangan yang lengkap terkait susunan dan organisasi Batour di Yogyakarta. Namun, rancangan usulan dari Panitia Urusan Turisme ini belum juga menemui titik temu. Pada akhirnya, ketua DPD Sultan Hamengkubuwana IX mengeluarkan Surat Keputusan DPD DIY No. 147/D/1959 pada tanggal 20 April 1959 yang melepaskan urusan kehotelan dan turisme yang sebelumnya berada di bawah JPU untuk sementara dimasukkan dalam Sekertariat Pemerintah Daerah DIY bagian umum. Pelepasan urusan kehotelan dan turisme ke Sekertariat Pemerintah Daerah ini juga menegaskan persoalan turisme di Yogyakarta masih dalam tahap perencanaan dan percobaan.

Peran Sultan pada saat menjadi koordinator Batour ini cukup penting. Hal ini terlihat dari pelbagai upayanya untuk mengembangkan pariwisata baik di Jawa Tengah maupun di Yogyakarta. Pelbagai upaya yang dilakukan Sultan ini antara lain melakukan koordinasi dengan daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan kebijakan, subsidi, inovasi sampai pada penyelenggaraan pariwisata. Namun, sejak Sultan ditunjuk menjadi ketua DTI pada tahun 1957, Batour Jawa Tengah maupun Yogyakarta terkesan hanya melaksanakan dan mengikuti kebijakan-kebijakan maupun program-program yang dikeluarkan oleh DTI. Selain itu, seringkali terjadi pergantian kabinet di pemerintahan pusat tidak menguntungkan bagi jalannya pemerintah. Terutama bagi daerah-daerah

yang membutuhkan segera persetujuan atau penjelasan dari pemerintah pusat terpaksa harus menunggu sehingga banyak kegiatan di daerah yang terhambat. Hal ini karena setiap kabinet menyusun program kerjanya tersendiri dan berbeda dengan kabinet sebelumnya. Keadaan ini tentu berdampak kepada banyak aspek, salah satunya dibidang pariwisata.

Membangun Kembali Layanan Wisata

Secara umum, keadaan akomodasi dan transportasi di Yogyakarta tidak lepas dari keadaan umum di Indonesia khususnya di Jawa pasca perang dan revolusi kemerdekaan. Fasilitas akomodasi yang merupakan peninggalan dari masa kolonial mengalami kerusakan dan beralih fungsi selama masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan (Withington, 1961). Pada dekade ini penginapan berupa hotel dan losmen juga disibukkan dengan pelbagai permasalahan yang ada seperti penetapan tarif, klasifikasi penginapan beserta pengelolaannya dan konflik antara direksi hotel dengan para karyawannya pada awal tahun 1950-an seperti yang terjadi di Hotel Garuda.³ Hal ini masih ditambah lagi dengan kekurangan tenaga yang cakap dibidang akomodasi seperti pada hotel dan pelayanannya (Foster, 1990)

Kondisi jaringan transportasi nasibnya tidak jauh berbeda seperti yang terjadi dalam hal akomodasi. Peralnya, pasca perang dan revolusi kemerdekaan banyak infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan berat pada saat peristiwa tersebut (Republik Indonesia, 1953: 417-418). Meski secara umum, Yogyakarta bisa diakses melalui jalur darat berupa kereta api, kendaraan darat seperti bis, truk, mobil dan melalui udara dengan pesawat terbang. Namun, kondisinya masih dalam tahap perencanaan dan perbaikan. Hal ini tidak lain karena pasca tahun 1950-an, banyak tenaga ahli, pegawai maupun perusahaan swasta yang sebelumnya dipegang oleh orang

³ Konflik ini terjadi sejak awal tahun 1950-an karena para pegawai menuntut upah yang tidak dibayarkan pada saat perang kemerdekaan berlangsung. Dimana pada saat itu, para pegawai tetap bekerja melayani tamu dan menjalankan pengelolaan hotel. Selain itu, pergantian manajemen hotel yang berdampak pada kebijakan terhadap para pegawai hotel. Lihat ANRI. Sekeretariat Negara Kabinet Perdana Menteri (KPM) 1950-1959. No. 3037. Lihat juga *Kedaulatan Rakyat*, 2 Januari 1951, 3 Maret 1951, 30 Juni 1952.

Belanda meninggalkan Indonesia (KR, 1951). Keadaan ini tentu mempengaruhi kemajuan di bidang transportasi karena masih sedikitnya orang Indonesia yang ahli dalam bidang tersebut.

Pariwisata di Yogyakarta dibangun bersamaan dalam keadaan yang demikian. Padahal transportasi dan akomodasi merupakan faktor yang penting dalam pengembangan sebuah daerah tujuan wisata. Melihat keadaan tersebut, pemerintah sadar akan kurangnya transportasi dan akomodasi yang memadai terutama untuk para tamu maupun pelancong. Menyikapi hal tersebut Batour kemudian mencari cara supaya para tamu terakomodir dengan baik dengan segala kekurangan yang ada. Fasilitas akomodasi yang ada di Yogyakarta hanya terdapat 2 hotel dan sekitar 47 losmen (Kota Jogjakarta, 1956: 125). Kedua hotel tersebut yaitu Hotel Garuda yang terdapat di Jalan Malioboro dan Hotel Merdeka yang terdapat di Jalan Gondolayu. Hotel Garuda yang merupakan hotel paling besar di Yogyakarta termasuk hotel dengan golongan kelas A 3, sedangkan Hotel Merdeka masuk dalam golongan hotel kelas CC (Kalawarti, 1956: 13-15).

Di Hotel Garuda hanya terdapat sekitar 73 kamar dan terbagi menjadi tiga kelas yakni Luxury, kelas I, II, dan III. Tarif luxury dipatok dengan harga Rp. 73, kelas I seharga Rp. 69, kelas II Rp. 50, dan untuk kelas III diharga Rp. 31. Biaya tersebut sudah termasuk dengan fasilitas makanan dan pelayanan dari pihak hotel (BPAD DIY No. 3153). Tarif penginapan yang lebih murah disediakan losmen maupun pesanggrahan yang terdapat di Ambarbinangun. Kelas dari losmen terbagi menjadi tiga golongan berdasarkan fasilitas dan layanan yang diberikan. Tarif untuk kelas I sebesar Rp. 10, kelas II Rp. 7.50, dan kelas III sebesar Rp. 5. (Kalawarti, 1956: 9-12). Jika digabungkan secara keseluruhan, terdapat sekitar 150 buah kamar penginapan yang terdiri dari hotel dan losmen di Yogyakarta (*Nasional*, 1962).

Tarif hotel dan losmen tersebut dirasakan cukup mahal terutama bagi masyarakat biasa. Selain itu kualitas dan kuantitas akomodasi yang ada di Yogyakarta jumlahnya tidak cukup banyak. Mengingat Yogyakarta menjadi salah satu daerah tujuan para wisatawan dan seringnya diselenggarakan

pelbagai acara yang menarik tamu untuk datang. Menyiasati hal tersebut, Batour menyediakan penginapan murah di Pesanggrahan Ambarbinangun dengan tarif yang dikenakan sebesar Rp. 5 lesehan (tikar dan bantal), Rp. 7, 50 dengan *veldbed* (kasur) untuk tiap orangnya (BPAD DIY No. 3173). Letak penginapan tersebut sekitar 2 km dari kota dan belum terdapat aliran listrik sehingga penerangan menggunakan lampu petromax. Pengelolaan dari penginapan ini diserahkan kepada swasta yakni travel biro dan hasil pendapatan bersih setiap tahunnya disetorkan kepada pemerintah sebanyak 25 persen. Batour juga menganjurkan kepada masyarakat yang memiliki rumah besar maupun pendopo untuk dapat dijadikan tempat menginap (BPAD DIY No. 3138 dan KR, 1956).

Batour juga bekerja sama dengan pelbagai pihak dalam melayani transportasi para pengunjung baik luar negeri maupun dalam negeri yang ingin menuju ke objek wisata. Batour memberikan pelayanan transportasi menggunakan mobil baik untuk keliling kota Yogyakarta maupun ke luar daerah seperti di Magelang, Semarang, maupun Surakarta (BPAD DIY No. 3175). Pada pelayanan tersebut, Batour bekerja sama dengan pihak swasta yang bergerak dalam bidang transportasi darat seperti pada N.V Prawiromulyo (Almanak, 1956: 158-180). Jadi posisi Batour di sini bertindak sebagai penyalur bagi para wisatawan yang membutuhkan transportasi menuju ke objek-objek wisata dalam jumlah sedikit maupun secara rombongan.

Secara umum, keadaan transportasi maupun akomodasi dalam melayani wisatawan di Yogyakarta pada saat itu cukup memprihatinkan. Hal ini tidak sebanding dengan promosi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun dari Batour sendiri dalam menjaring wisatawan menuju Yogyakarta. Pasalnya, dalam kurun waktu pembentukan Batour sampai pada pelaksanaannya, tidak terdapat pembangunan maupun penambahan fasilitas-fasilitas tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 1957 Sultan mempunyai gagasan untuk membuat hotel yang berada di Ambarrukmo yang direncanakan sebagai hotel yang paling megah di Jawa Tengah dan Yogyakarta (KR, 1957). Pembangunan hotel ini urung terlaksana karena terbentur dengan ketersediaan anggaran yang

cukup besar untuk pembangunannya. Sehingga yang terjadi banyak para wisatawan yang merasa kecewa pada saat menginap di Yogyakarta dan memilih untuk menginap di Hotel Dana Solo (KR, 1955).

Pada bidang transportasi sendiri, pemerintah daerah sebenarnya sudah merencanakan untuk mendirikan biro perjalanan sendiri yang bersifat komersil. Hal ini karena biro perjalanan milik swasta yang ada di Yogyakarta kondisinya tidak representatif seperti keinginan dari pemerintah. Secara umum pada dekade ini belum terdapat trayek bus maupun transportasi darat lainnya yang dikhususkan untuk kegiatan pariwisata di Yogyakarta. Beberapa objek wisata yang dapat diakses dengan angkutan tersebut karena secara kebetulan melewati objek-objek wisata atau sengaja dibentuk bersamaan dengan adanya acara maupun pertunjukan.

Jadi, banyaknya para wisatawan yang datang ke Yogyakarta secara tidak langsung bisa dibayangkan terkait dengan minimnya fasilitas akomodasi maupun transportasi yang tersedia. Meski berada dalam kondisi demikian, Batour mampu mengakomodir para wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Setidaknya dengan pembentukan Batour ini, para pengunjung yang datang ke Yogyakarta mendapat pelayanan dan diarahkan dengan baik.

Aktivitas Batour menjamu Wisatawan

Setelah terbentuknya Batour pada tahun 1955, pengelolaan pariwisata di Yogyakarta menjadi lebih teratur dan jelas. Batour melayani penyelenggaraan pariwisata baik di dalam kota Yogyakarta maupun keluar daerah. Turis asing pertama yang dikelola oleh Batour merupakan rombongan dari *Standard Vacuum Company* (Stanvac) Palembang sebanyak 10 orang (KR, 1956). Untuk melayani para turis ini Batour Jawa tengah bekerjasama dengan Batour Yogyakarta. Para turis ini menginap di Kaliurang dan dipertunjukkan acara kesenian dengan bekerja sama dengan Badan Seni Tari Tjorak Jogja (BPAD DIY No. 3197). Selain itu, Batour juga mengadakan percobaan pertama melayani turis dalam negeri pada akhir tahun 1955, sebanyak 125 orang dari

Kedu ke Yogyakarta untuk melihat pertunjukan kesenian Jawa di Yogyakarta (BPAD DIY No. 3132).

Banyaknya para tamu yang akan mengunjungi Yogyakarta, membuat Batour mengeluarkan aturan yang lebih jelas dalam melayani para tamu. Hal ini terlihat dari pengumuman resmi Batour pada kurun tahun 1956 sampai 1958. Pada pengumuman resmi tersebut dijelaskan bahwa Batour bersedia melayani turis dalam negeri maupun luar negeri yang akan berkunjung ke Yogyakarta. Permintaan pelayanan kepada Batour bisa bertemu dengan pengurusnya maupun mengirim surat minimal satu minggu sebelumnya. Pada permintaan tersebut disertai keterangan lengkap antara lain jumlah rombongan, waktu akan berkunjung, kendaraan yang digunakan, menginap atau tidak, dan objek yang akan dikunjungi.

Tarif pelayanan tersebut untuk jumlah rombongan pengunjung dalam negeri 1-10 orang sebesar Rp. 5,-, untuk rombongan 11-20 orang Rp. 4,- dan 21 ke atas dikenakan tarif Rp. 3,- untuk pelayanan satu hari satu malam. Bagi para rombongan yang datang, maka Batour menyediakan titik-titik penjemputan. Jika rombongan datang dengan bis atau truk akan dijemput di kantor Kemantren Pamong Praja di Jetis, sedangkan rombongan yang datang dengan menggunakan kendaraan mobil, pick up, jip dijemput di kantor Kepatihan di Jalan Malioboro (BPAD DIY No. 3172, 3131, dan 3284).

Melihat hal tersebut, terlihat peran dari Batour dalam mengelola aktivitas wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Para wisatawan yang meminta pelayanan kepada Batour setidaknya harus menghubungi Batour minimal satu minggu sebelum pelaksanaannya. Hal ini karena terkait dengan perizinan ke objek-objek wisata di Yogyakarta, terutama Kraton dan objek milik pemerintah (BPAD No. 3241). Batour juga melayani wisatawan luar negeri yang berkunjung ke Yogyakarta. Pelayanan turis luar negeri ini dilayani secara mendadak karena masih belum terdapat aturan yang jelas antara pemerintah pusat dengan Batour. Hal ini terjadi karena banyak para tamu-tamu luar negeri tersebut dianggap sebagai tamu dari pemerintah sehingga Batour

mengeluarkan segala biaya untuk para tamu tersebut dan akan ditukar oleh pemerintah pusat (BPAD DIY No. 3231 dan No. 3235)

Dalam pengembangan pariwisata di Yogyakarta, pemerintah tidak bekerja sendirian. Pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pelbagai pihak untuk pelayanan dan fasilitas para turis, seperti bekerjasama dengan *Indonesia Association for Stimulating Tourism* (Indasto). Indasto atau Badan Penganjur Turisme ini merupakan badan swasta yang bertugas membantu pemerintah dalam mengelola dan melayani para turis. Pada tahun 1955, Indasto sudah membuat pelbagai bahan untuk keperluan para turis seperti mengorganisir seniman-seniman yang ada di Yogyakarta. Seni tari klasik-semi modern dipimpin oleh Bei Djojositikno seorang penari dan guru tari. Seni wayang kulit dan wayang golek dipimpin oleh Widi, seorang dalang yang terkenal. Seni suara dan gamelan dibawah pimpinan Prawirolalito dari Langen Budaya. Pertunjukan tersebut oleh Indasto sudah diatur sedemikian rupa sehingga selaras dengan keinginan para turis dimana tidak terlalu panjang durasinya (BPAD DIY No. 3182 dan KR, 1956).

Batour juga membuat paket-paket wisata yang ditujukan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Paket tersebut antara lain perjalanan keliling Yogyakarta selama satu hari penuh. Paket wisata tersebut tidak terbatas di Yogyakarta sendiri akan tetapi juga mengunjungi Candi Borobudur, ke Surakarta untuk melihat maleman Sriwedari bahkan juga terdapat paket wisata ke Bali. Selain itu Batour juga menjajaki kemungkinan untuk membuat paket wisata di Nusa Kambangan dan juga pabrik Semen Gresik di Jawa Timur. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Batour di bawah pimpinan KRT Dipodiningrat sudah bergerak cukup maju dengan segala keterbatasan pengalaman yang dimilikinya.

Pada akhirnya, meski sudah berjalan dengan baik, pengelolaan pariwisata dari Batour ini kemudian terbentur dengan kurangnya tenaga yang terampil dan terdidik. Batour dikelola oleh pegawai JPU yang jumlahnya terbatas. Para pegawai JPU melayani para wisatawan hanya sebagai pekerjaan sampingan saja. Hal ini tentu berdampak pada pelayanan terhadap para wisatawan yang

datang. Selain itu dibidang akomodasi, pihak hotel dan para pelayannya memberikan pelayanan yang kurang maksimal bahkan mengecewakan bagi para tamu yang menginap. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh Harlord Foster yang menginap di Hotel Garuda pada pertengahan tahun 1950-an;

Seorang pelayan, dengan berseragam rompi lusuh, mengenakan peci hitam dan hanya bertelanjang kaki datang menghampiri kami. Ia kemudian meletakkan seluruh hidangan dihadapan kami. Hidangan tersebut berupa sup hingga buah-buahan dan semua makanan ini sudah dingin. Sup kaldu yang encer, sayur kecoklatan, nasi putih yang keras, dan sosisir pisang (Rush: 2013; 273).

Berkaitan dengan penyediaan tenaga dalam bidang pariwisata, lembaga pendidikan formal yang memberikan bekal ilmu tentang kepariwisataan masih sangat terbatas bahkan tidak ada sama sekali. Persiapan tenaga dibidang kepariwisataan terutama terkait dalam bidang pelayanan di Indonesia dipelopori oleh DTI baru pada tahun 1957. DTI membuka beasiswa bagi para calon pelayan yang lolos seleksi untuk dibekali ilmu dibidang kepariwisataan. Namun kuota yang disediakan masih sedikit dan banyak siswa rekomedasi dari Batour yang ditolak karena kuotanya sudah penuh (BPAD DIY No. 3168).

Menghadapi kurangnya pelayanan yang terdidik ini kemudian pemerintah mensiasati dengan cara yang lain. Contohnya pada saat berlangsungnya Konferensi Colombo di Yogyakarta tahun 1959, tenaga untuk melayani para tamu disiapkan secara sistematis dibawah arahan Bambang Sugeng dari Nitour. Mereka memanfaatkan para mahasiswa UGM yang dipimpin oleh Koesnadi Hardjosoematri (Depari: 1997;36.). Tenaga dari para mahasiswa ini masih terus terpakai untuk membantu menjadi pemandu para tamu yang datang ke Yogyakarta. Namun upaya ini belum cukup maksimal untuk mengakomodir banyaknya para wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Setidaknya, pemerintah sudah melakukan pelbagai usaha untuk melayani para wisatawan dengan baik dan tidak mengecewakan.

Wisata Yogyakarta: Jejak Peradaban yang Eksotik

Selama dekade tahun 1950-an, objek pariwisata di Yogyakarta terus mengalami perbaikan dan penambahan. Menurut catatan dari Batour, terdapat sekitar 23 objek wisata yang tersebar di Yogyakarta berupa tempat peninggalan sejarah, industri, pusat kerajinan, kebun binatang, makam, dan pemandangan alam. Objek tersebut antara lain Kraton, Taman Sari, tempat tinggal Pangeran Diponegoro di Tegalredjo, Museum Sono Budaya, Gembira Loka, Radio Republik Indonesia (RRI), Perusahaan Perak, Perusahaan Batik, Balai Penyelidikan Batik, Balai Penyelidikan Kulit, pabrik susu Saridele, Percetakan RI, pabrik cerutu Tarumartani, makam Kota Gede, industri perak Kota Gede, makam Imogiri, pabrik gula Madukismo, pantai Parangtritis, Kaliurang, Pantai Krakal, Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Gua Selarong (BPAD No. 3128).

Berdasarkan catatan dari Batour tersebut, objek wisata yang ada di Yogyakarta cukup banyak dan beragam. Hal ini karena luasnya pengertian dari objek wisata dan wisatawan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Batour menjadikan perusahaan maupun pabrik sebagai objek pariwisata karena banyaknya para pengunjung yang mendatangi tempat-tempat tersebut. Candi Borobudur juga turut dimasukkan ke dalam daftar objek pariwisata yang ada di Yogyakarta padahal letaknya berada di daerah Jawa Tengah tepatnya di Magelang. Daya tarik dan keunikan Candi Borobudur dimata para pelancong sudah terbangun sejak era kolonial berlangsung. Setiap wisatawan maupun tamu-tamu negara yang akan mengunjungi Borobudur selalu melalui Yogyakarta terlebih dahulu. Maka tidak heran bahwa candi tersebut dijadikan sebagai salah satu promosi objek daya tarik para wisatawan di Yogyakarta.

Salah satu daya tarik para pengunjung yang datang ke Yogyakarta juga terdapat di Jalan Malioboro. Kawasan Malioboro merupakan salah satu ikon Yogyakarta yang ramai dikunjungi wisatawan maupun masyarakat lokal. Pasalnya, dikawasan ini terdapat kantor pemerintahan, pertokoan, pasar, hotel, losmen dan kantor-kantor swasta lainnya. Jalan Malioboro juga menjadi tempat untuk mengadakan pawai, demonstrasi, rapat umum dan pelbagai kegiatan lain.

Melihat hal tersebut, selain sebagai urat nadi perekonomian, kawasan Malioboro juga merupakan pusat keramaian yang berada di Yogyakarta. Kesan tentang keadaan Malioboro pada tahun 1950-an tersebut digambarkan dalam sebuah majalah lokal sebagai berikut;

“Djokja dengan Malioboro-nja jang sungguh ramai dan menarik. Kalau pengunjung datang ke Djokja, baik dari dalam maupun luar negeri sonder Malioboro, masih kurang tjukup puas rasanja, sekalipun masih banyak tempat menarik lainnja. Tetapi tentu tidak ketinggalan mereka mampir Malioboro juga untuk membeli tanda mata (oleh-oleh)” (Minggu Pagi: 1951; 14-15).

Daya tarik lain dari Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari kebudayaannya. Pelbagai upacara tradisional yang sudah lama ada di daerah ini juga turut menjadi daya tarik tersendiri. Upacara tradisional tersebut seperti Sekaten dan Gerebeg Maulud, dan upacara Labuhan di pantai Parangkusuma. Pada perkembangannya, Sekaten ini kemudian diramaikan dengan pasar malam yang berisi eksposisi seni berupa tari, dagelan, ketoprak, dan juga stan-stan pameran untuk program-program pemerintah maupun pihak swasta.

Pemerintah juga membuat acara-acara lainnya seperti pekan raya dan peringatan hari kemerdekaan beserta dengan acara hiburannya. Pekan raya pertama di Yogyakarta yang diadakan secara besar-besaran berlangsung selama 40 hari pada bulan 7 September-17 Oktober 1956 untuk memperingati 200 tahun berdirinya kota Yogyakarta (Kota Jogjakarta: 1956). Keberhasilan menyelenggarakan acara ini membuat pemerintah kemudian mengadakan kembali pekan raya setiap 4 sampai 5 tahun sekali. Acara ini gencar dipromosikan oleh pemerintah daerah dan tujuan diselenggarakannya untuk menarik pengunjung datang ke Yogyakarta.

Secara khusus, promosi pariwisata di Yogyakarta lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebagai langkah awal, pada tahun 1954 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 10.000,- dimana setengahnya untuk promosi seperti menerbitkan brosur-brosur, buku petunjuk, peta-peta DIY yang mempunyai objek turisme. Setengahnya lagi diberikan kepada pemerintah kabupaten Gunung Kidul untuk membangun turisme yang sedang diusahakan

disana (KR, 1955). Pemerintah juga dibantu dengan Indasto untuk mempromosikan pariwisata di Yogyakarta. Indasto membuat bahan-bahan promosi seperti buku panduan pariwisata Yogyakarta berbahasa Inggris beserta dengan peta. Namun, upaya-upaya ini tidak maksimal karena dari pihak Indasto sendiri mengalami kekurangan dana (BPAD DIY No. 3182).

Keterbatasan dana juga dialami oleh pemerintah daerah terlebih Batour sebagai pelaksana pariwisata di Yogyakarta. Secara khusus, Batour mengalihkan cara-cara promosinya dengan menggunakan jalur resmi pemerintahan. Maksudnya setelah membuat pengumuman resmi tentang program pelayanan, paket wisata, maupun objek wisata baru yang, kemudian Batour mengirimkan surat yang berisi keterangan resmi tersebut kepada pemerintah pusat di pelbagai kementerian, kedutaan, DTI pusat, Nitour, para gubernur, residen, dan para bupati yang berada di luar Yogyakarta. Cara promosi ini cukup berhasil terlihat dari permintaan pelayanan kepada Batour dan para pengunjung yang datang (BPAD DIY No. 3281). Jadi sejauh ini belum ditemukan bentuk promosi yang dikeluarkan secara resmi dari Batour seperti peta, folder, buku panduan, dan informasi tentang promosi pariwisata Yogyakarta lainnya.

Pada akhirnya, pembangunan objek dan promosi pariwisata di Yogyakarta terbentur dengan ketersediaan dana. Pelbagai objek-objek yang potensial banyak yang terbengkalai karena tidak terurus dengan baik. Kemampuan daerah untuk membangun objek-objek tersebut terkendala dengan kondisi keuangan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Ketua JPU, Dipodiningrat pernah menyarankan bahwa terkait dengan pembangunan objek wisata sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Peran dari pemerintah hanya sebatas memberikan izin serta membuat aturan-aturan yang mempermudahnya.

Selain itu, sebagaimana terjadi di Yogyakarta saat itu, birokrasi pemerintahan yang ada tidak menghendaki adanya modal asing. Padahal banyak sektor-sektor potensial bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berupa lapangan pekerjaan yang rusak pasca perang kemerdekaan terjadi. Jadi pemulihan ekonomi pasca perang di Yogyakarta sebagian besar

diprakarsai oleh Sultan. Hal ini karena di Yogyakarta tidak terdapat wirausahawan lokal yang cukup kuat selain masyarakat keturunan Tionghoa (Soemardjan: 2009). Maka bisa dipastikan pembangunan pariwisata di Yogyakarta pada saat itu berjalan tidak maksimal, baik dari sisi pembangunan objek wisatanya maupun dari segi promosi.

Wisatawan-Wisatawan di Yogyakarta

Promosi pariwisata yang dilakukan oleh Batour untuk menarik para pengunjung untuk datang ke Yogyakarta tersebut ternyata berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari kunjungan para wisatawan, terutama dalam negeri yang datang dari pelbagai daerah terutama di Pulau Jawa. Pada tahun 1956, kunjungan para wisatawan di Yogyakarta sebanyak 4.881 orang dengan jumlah 109 rombongan. Puncak kunjungan ini terjadi pada bulan September-Oktober karena bersamaan dengan adanya acara peringatan 200 tahun Kota Yogyakarta dan juga Sekaten. Sedangkan pada tahun 1957, terdapat 41 rombongan dengan jumlah pengunjung sebanyak 1.228 orang (BPAD No. 3117). Penurunan pengunjung ke Yogyakarta ini cukup signifikan karena pada tahun 1957 tidak terdapat acara yang cukup besar.

Menurut catatan dari Batour, jumlah rombongan pengunjung tersebut tidak hanya berasal dari pegawai pemerintah (pamong praja) saja, akan tetapi juga berasal dari masyarakat umum Artinya, informasi dan promosi melalui surat resmi yang ditunjukkan kepada pemerintah setempat kemudian disebarluaskan sampai ke tingkat bawah yaitu kecamatan dan kelurahan. Para pengunjung tersebut sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Tengah karena bisa dipahami jaraknya tidak terlalu jauh dengan Yogyakarta. Data tersebut merupakan jumlah kunjungan wisatawan yang berasal dari luar Yogyakarta yang meminta pelayanan terhadap Batour.

Berdasarkan catatan dari pemerintah, jumlah kunjungan ke Kraton yang didapat dari Tepas Dwara Pura, pengunjung di Kraton dari tahun 1950-1955 mencapai 240.569 orang dengan 2.351 rombongan selama kurun waktu tersebut (Kalawarti, 1956: 1-2). Sedangkan pengunjung yang datang ke

Museum Sonobudaya juga cukup banyak. Pada tahun 1957 sekitar 33.027 orang dan pada tahun 1958 sebanyak 39.383 orang terdiri dari para tamu luar negeri maupun dalam negeri (Statistik Pemerintah, 1958: 37). Jumlah pengunjung dari kedua objek wisata tersebut bisa dipastikan didominasi oleh masyarakat Yogyakarta sendiri dan tidak menggunakan pelayanan dari Batour.

Keraton Yogyakarta menjadi favorit bagi para wisatawan baik asing maupun domestik. Pasalnya, pada masa sebelumnya, keraton hanya bisa dikunjungi oleh para elit saja dan masyarakat biasa hanya bisa melihat dari luar tembok keraton. Banyaknya jumlah pengunjung yang masuk ke Keraton ini dikarenakan Sultan Hamengkubuwana IX sejak awal tahun 1950-an membuka Keraton untuk dikunjungi oleh umum, baik dari para pegawai pemerintah, masyarakat umum, maupun para pelancong. Salah satu kesan dari para wisatawan yang mengunjungi keraton terlihat dari para wisatawan yang berasal dari Jawa Timur. Pada suratnya yang ditujukan kepada Sultan, mengatakan;

Kami serombongan sungguh merasa berbesar hati, setelah mengetahui dengan jelas keadaan di dalam Istana Jogjakarta. Bagi kami sekalian yang belum pernah mengetahui kebesaran-kebesaran dari pada istana, setelah mengetahui dengan mata kepala sendiri, merasa serba gumun dari keadaannya yang serba mentahajubkan, terutama mereka yang kurang pengetahuannya. Sungguh banjak amat yang kami ketahui dan dapat kami rasakan dalam hati sanubari, sehingga bagi kami sekalian merupakan suatu kenang-kenangan bagi bekal hidup di pedalaman atau pegunungan yang selanjutnya dapat ditjeritakan kepada anak tjuju kami sekalian. Dengan kata-kata singkat, semoga istana yang merupakan kebesaran dari pada bangsa Djawa chususnja dan bangsa Indonesia pada umumnya, selalu mendapat perhatian dan pemeliharaan yang sempurna sehingga tidak lenjap dari pandangan sejarah seperti tjandi-tjandi yang kami kundjungi itu (BPAD DIY No. 3281).

Berdasarkan dari pelbagai sumber yang didapatkan, jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta bisa diperkirakan cukup banyak. Akan tetapi, catatan tentang kunjungan para wisatawan yang cukup lengkap sulit untuk dilacak kembali. Bahkan data resmi dari Batour tentang jumlah kedatangan wisatawan baik luar negeri maupun dalam negeri setidaknya sampai tahun 1960-an sulit didapatkan. Hal ini karena tidak semua para wisatawan yang datang di

Yogyakarta meminta pelayanan Batour maupun Nitour. Kondisi ini ditambah dengan pihak pengelola objek-objek wisata seperti Keraton, Museum Sono Budoyo dan banyak objek yang terdapat di Yogyakarta kurang memperhatikan catatan jumlah pengunjung yang datang ke tempat tersebut. Pihak hotel juga tidak memberikan laporan lengkapnya tentang jumlah para tamu yang menginap (ANRI No. 1440). Keadaan ini membuat statistik jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Yogyakarta belum terkoordinasikan dengan baik.

Hasil dari promosi pariwisata di Yogyakarta oleh pemerintah daerah dan jumlah kunjungan para wisatawan ke Yogyakarta cukup sebanding dengan upaya yang dilakukannya. Banyaknya objek wisata beserta atraksi kebudayaannya kurang mendapat promosi yang maksimal. Hal ini karena terbentur dengan anggaran pemerintah dan sektor pariwisata masih kurang mendapat perhatian yang serius. Meski demikian, Yogyakarta tetap diuntungkan dengan perjalanan historis dan jiwa zaman pada saat itu. Yogyakarta menjadi kota penting dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Ibukota Revolusi dan keragaman objek serta atraksi wisata yang dimilikinya. Hal ini secara langsung maupun tidak menjadi salah satu citra penting dari kota ini dan menarik para wisatawan untuk datang ke Yogyakarta.

Dampak Pengembangan Pariwisata di Yogyakarta tahun 1950-an

Pengembangan sektor pariwisata di Yogyakarta sebagian besar dipegang oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan langkah Sultan Hamengkubuwana IX sebagai kepala daerah yang bertindak seperti wiraswasta untuk membangun kembali perekonomian daerahnya. Salah satunya adalah Sultan tidak berusaha membangun industri baru akan tetapi mencoba menghidupkan lagi industri-industri yang rusak atau ditutup selama perang dan revolusi nasional (Soemardjan, 2009: 345-346). Maka kemudian, pengembangan pariwisata di Yogyakarta pada tahun 1950-an tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Pariwisata yang berkembang pada dekade tersebut secara tidak langsung merangsang pembangunan ditingkat provinsi maupun kabupaten. Pemerintah melakukan perbaikan menuju akses-akses objek wisata

yang sering mendapat kunjungan para wisatawan. Selain itu, untuk menambah hiburan bagi masyarakat lokal dan menarik para wisatawan, pemerintah membuat pelbagai acara-acara dan pengembangan objek wisata baru.

Pengembangan objek wisata baru ini dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta maupun oleh masyarakat sendiri. Pihak swasta yang terlibat antara lain Yayasan Gembira Loka yang berhasil membangun sebuah kebun binatang pada tahun 1956 meskipun pihak swasta tersebut masih merupakan orang-orang penting di dalam pemerintahan seperti Paku Alam VIII (KR, 1956). Pembangunan pariwisata di Yogyakarta juga turut menggerakkan peran masyarakat untuk membuka objek-objek wisata baru terutama di daerah Gunung Kidul. Masyarakat melakukan gotong-royong dalam membangun akses ke Pantai Krakal dengan harapan dapat menambah pemasukan masyarakat itu sendiri (KR, 1956). Pada perkembangannya, pemerintah memberikan perizinan, subsidi dan promosi terhadap objek-objek yang dikembangkan tersebut.

Adanya pengembangan terhadap acara-acara besar yang ada di Yogyakarta juga turut menarik kedatangan para wisatawan. Acara pertama yang cukup besar yang diselenggarakan oleh pemerintah kotapraja tentang peringatan 200 tahun kota Yogyakarta. Acara ini juga menjadi percobaan pertama dari Batour dalam mengelola tamu maupun wisatawan yang datang dari pelbagai daerah. Pada perkembangannya, pada tahun 1956 Batour mampu mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.952,20,- dari hasil pelayanan, penyewaan akomodasi, dan jasa lainnya.

Pendapatan dari Batour sebagian besar diperoleh dari pelayanan, persewaan akomodasi di Ambarbinangun, dan malam kesenian yang diadakan di Purwodiningratan. Usaha yang dilakukan Batour lainnya seperti membuat paket wisata ke luar daerah, menyediakan konsumsi, dan memberikan pelayanan transportasi. Upaya dari Batour menambah pendapatan dari dari pengelolaan pariwisata tersebut berjalan tidak terlalu lancar. Hal ini disebabkan dengan kebijakan yang ada ditingkat provinsi yang belum sepenuhnya melihat pariwisata sebagai salah satu sektor penting. Fasilitas akomodasi dan

transportasi yang tersedia kurang representatif bagi para wisatawan. Pembangunan objek wisata beserta akses menuju ke objek tersebut berjalan sangat lambat. Pemerintah daerah sepertinya masih disibukan dengan upaya-upaya memulihkan perekonomian di Yogyakarta pasca perang kemerdekaan di luar sektor pariwisata.

Banyaknya acara-acara hiburan yang ada di Yogyakarta seperti pekan raya dan Sekaten juga mendapatkan respon yang beragam. Pariwisata dan segala keramaiannya di Yogyakarta dibangun seiring dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang cukup memprihatinkan. Inflasi yang terjadi pada dekade 1950-an mengakibatkan naik turunnya harga-harga kebutuhan pokok dan kelaparan yang terjadi di beberapa daerah serta penyakit *hongerodem* (H.O) yang merebak di Yogyakarta. Namun di sisi lain, pelbagai perayaan tradisional seperti Sekaten, Gerebek Maulud juga pekan-pekan raya selalu penuh dengan banyaknya pengunjung baik dari Yogyakarta maupun luar daerah. Seperti yang dilaporkan dalam majalah lokal "*Minggu Pagi*" pada tahun 1957;

“Zaman sukar dan krisis ekonomi seperti sekarang ternyata tidak mengurangi jumlah penonton Sekaten. Dan bila kita berada di tengah keramaian Sekaten Jogja, kita dapat kesan seolah-olah rakyat udah makmur, keadilan sosial sudah merata, murah rejeki, murah sandang pangan, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada pengangguran, tidak ada orang yang melarat hidupnya. Semua riang gembira meramaikan Sekaten. Anak-anak berpakaian bagus-bagus, dibelikan mainan. Pemuda-pemudi berpakaian jengki menjual aksi menggiurkan hati. Banyak pula yang menyerbu rumah makan, memesan makanan yang lezat-lezat. Uang mengalir ke kantong para pembuka stand di Sekaten Perputaran uang berjalan dengan cepat seperti digelanggang roulette, pindah dari satu tangan ke tangan lain dalam waktu yang singkat” (Minggu Pagi, 1957).

Keadaan ini menggambarkan keadaan masyarakat yang terjadi pada saat itu. Terlebih, di perayaan Sekaten ini masyarakat tidak dipungut biaya dan bebas menikmati hiburan yang disediakan. Ramainya pengunjung pekan raya ini dari tahun ke tahun menunjukkan antusias masyarakat terhadap acara-acara hiburan yang berada di Yogyakarta meski keadaan perekonomian sedang sulit.

Bahkan dikatakan bahwa di Yogyakarta terlalu banyak hiburan baik yang bersifat modern maupun tradisional seperti festival band, bioskop, pertunjukan seni drama, wayang orang, wayang golek, ketoprak, ludruk, malam gembira, malam seni tari dan sebagainya yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat (Minggu Pagi, 1960).

Perkembangan pariwisata di Yogyakarta yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung memang mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat. Hal ini terutama kepada sektor-sektor pekerjaan yang tidak langsung seperti kerajinan, kesenian, dan pekerjaan pendukung lainnya. Akan tetapi, pembangunan pariwisata yang diupayakan oleh pemerintah secara umum belum mampu mengakomodir penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Yogyakarta. Hal ini diakibatkan karena kurangnya tenaga kerja yang terdidik, berpengalaman dan tarik-menarik kepentingan politik yang terjadi pada beberapa proyek yang dilakukan oleh pemerintah.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh pemerintah lainnya adalah kepadatan penduduk di Yogyakarta yang terjadi sejak masa revolusi. Kepadatan penduduk ini terus bertambah meskipun perang sudah selesai. Arus urbanisasi juga terjadi dari pedesaan menuju ke kota karena terjadinya proses deindustrialisasi sejak akhir masa kolonial dan perkembangan sektor-sektor perekonomian yang ada di kota Yogyakarta. Kedatangan para penduduk di kota ini tidak hanya yang berasal dari pedesaan di Yogyakarta saja akan tetapi juga berasal dari daerah sekitar untuk mencari pekerjaan. Serapan tenaga kerja yang minim, kepadatan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun dan terjadinya inflasi pada dekade ini memunculkan pelbagai permasalahan baru seperti pengangguran, penyakit Hoengerodem (H.O) dan gelandangan yang tersebar hampir di seluruh Yogyakarta.

Terlepas dari pelbagai pengaruh dari pariwisata yang dikembangkan di Yogyakarta pada tahun 1950-an ini, pemerintah tetap belum mampu menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang menambah pendapatan daerah. Hal ini berkaitan dengan proses otonomi yang diperjuangkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1950-an. Pada kenyataannya, pemerintah masih

tetap bergantung dengan pemerintah pusat dalam banyak hal seperti untuk anggaran rutin, gaji pegawai dan pembangunan daerah. Pemerintah tidak mampu memaksimalkan potensi daerahnya sehingga intervensi pemerintah pusat masih tetap tinggi di Yogyakarta. Meski disisi lain, masyarakat cukup terhibur dengan adanya pembangunan kepariwisataan yang berlangsung pada dekade ini. Adanya pekan raya, pasar malam dengan segala keramaiannya serta objek-objek wisata murah bahkan gratis menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat untuk sejenak melupakan kondisi yang ada.

PENUTUP

Pariwisata di Yogyakarta pada dekade 1950-an merupakan sebuah upaya awal yang benar-benar baru. Maksudnya, sebelumnya kegiatan pariwisata di Yogyakarta sudah ada sejak masa kolonial dan mereka yang terlibat dan menikmatinya merupakan orang-orang asing. Masyarakat lokal hanya menjadi objek dari pariwisata masa itu. Pasca kemerdekaan, pariwisata dikembangkan kembali dengan memanfaatkan segala fasilitas yang tersisa dan dengan cara melakukan peniruan dari pola yang ada sebelumnya. Pembangunan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di di Indonesia.

Menjadi pertanyaan yang menarik, mengapa pemerintah perlu membangun kembali pariwisata di Yogyakarta pada saat itu? Hal ini tidak lain karena tersedianya pelbagai potensi yang ada seperti objek dan atraksi wisatanya. Pariwisata dilihat sebagai satu-satunya sektor yang dapat dibangun tanpa membutuhkan modal yang besar. Mengingat banyak sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah yang rusak karena perang. Jika harus dibangun tentu membutuhkan modal dan investasi yang cukup besar. Akan tetapi pemerintah luput, bahwa ternyata pembangunan pariwisata tidak bisa dilihat secara sederhana. Pariwisata berkaitan dengan multi aspek yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Secara keseluruhan, Yogyakarta tampaknya bergerak lebih maju dalam pengembangan pariwisata dibandingkan dengan daerah lain secara nasional.

Kebijakan tentang pariwisata yang dicanangkan sejak tahun 1954 dengan keputusan dari DPRD DIY menjadi langkah awal untuk merealisasikan wacana-wacana tentang pembangunan pariwisata. Sejalan dengan itu, diikuti pembentukan sebuah badan turisme (Batour) pada tahun 1955 sebagai wadah terpusat pengelolaan pariwisata. Meski pada perkembangannya terdapat pelbagai hambatan yang mengiringi pembangunan pariwisata di Yogyakarta. Terlepas dari itu, terbentuknya Batour menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Yogyakarta yang sebelumnya tidak teratur menjadi lebih terstruktur. Pada perkembangan selanjutnya, pariwisata yang dikembangkan di Yogyakarta pada dekade 1950-an menjadi pondasi yang cukup kuat dalam rangka mencari pengalaman tentang pengelolaan pariwisata di Yogyakarta secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- “Djokja-Varia”, Minggu Pagi*, No. 18, Tahun III, 29 Juli 1951.
- “Hudjan Batu di Hotel Garuda”, Kedauletan Rakjat*. Senin 15 Februari 1957.
- “Jumlah Penginapan di Jogja tidak akan tjukupi Pekan Raya 200 tahun”, Kedauletan Rakjat*. Selasa, 31 Juli 1956.
- “Keadaan Hotel-hotel dan Losmen-losmen minta perhatian. Kedauletan Rakjat*. Sabtu 11 Februari 1956.
- “Pantai Krakal Objek Tourisme Baru. Kedauletan Rakjat*. Selasa 3 Juli 1956.
- “Pekan Raya 200 tahun untung Rp. 662.330,91”. Kedauletan Rakjat*. Rabu 31 Oktober 1956.
- “Politik pengangkutan Indonesia kurang sempurna”. Kedauletan Rakjat*. 2 Februari 1951.
- “Perhatian masjarakat terhadap Gembira Loka tjukup besar”, Kedauletan Rakjat*. Senin 8 Oktober 1956.
- “Rentjana Tourisme di Tingkat Permulaan”. Kedauletan Rakjat*. Jumat 4 November 1955.
- “Rombongan Koordinator Tourisme Djateng ke Purwokerto” Kedauletan Rakjat*. Senin 20 Februari 1956.
- “Touris Luar Negeri Pertama”. Kedauletan Rakjat*. Senin 26 Maret 1956.
- “Usaha-usaha Tourisme: Hotel modern dan terbesar di Djateng akan dibangun”, Kedauletan Rakjat*. Jumat 15 Februari 1957.
- “Varia 200 tahun” Kedauletan Rakjat*, 7 September-17 Oktober 1956.
- Almanak Ekonomi Populer ke VI 1956*. Jogjakarta: Sekretariat Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, 1956.
- ANRI, Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI tahun 1950-1959 No. 2238; 1265

- ANRI. Inventaris Arsip Perdana Menteri RI (PMRI) No. 474.
- ANRI. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri (KPM) 1950-1959. No. 1440; 3037; 3218; 1716.
- Arsip Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta, Inventaris Arsip Jawatan Pemerintahan Umum (JPU) No. 3175; 3197; 3241; 3231; 3235; 3182; 3281; 3212; 3138; 3173; 3146; 3153; 3139; 3144; 3124.
- Cooper, Chris., dan Hall, C. Michael. 2008. *Contemporary Tourism: an International Approach*. Oxford: Elsevier.
- Cribb, Robert. 1995. "International tourism in Java 1900-1930". *Jurnal South East Asia Research*, 3 (2).
- Christia, Adissya Mega dan Ispriyarso, Budi. 2019. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia, *Law Reform* Vol 15 No. 1.
- Dahles, Heidi. 2001. *Tourism, Heritage and National Culture in Java: Dilemmas of a Local Community*. Great Britain: Curzon Press.
- Depari. 1997. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kepariwisata di Indonesia*. Jakarta: Depari.
- Foster, Harlord. 1990. *Flowering Lotus: a View of Java in the 1950s*. Singapore: Oxford University Press.
- Getz, Donald. 1987. *Tourism planning and research: Traditions, models and futures*. Paper presented at the Australian Travel Research Workshop, Bunbury, Western Australia, 5-6 November.
- Gottschalk, L. 2008. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press.
- Kodhyat. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangan Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 1996.
- Kota Jogjakarta 200 tahun, 7 Oktober 1756 - 7 Oktober 1956*. Jogjakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 tahun, 1956.
- Majalah Kalawarti "Ekonomi"*. No. 6 Th IX, Juni 1956.
- Majalah Kalawarti "Ekonomi"*. No.3 Tahun IX, Maret 1956.
- Minggu Pagi*, No. 26 Tahun X, 29 September 1957.
- Minggu Pagi*, No.23 Tahun XIII, 4 September 1960.
- Nasional*, 1962.
- Nordholt, Henk S. 2011 "Indonesia in the 1950s Nation, modernity, and the post-colonial" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, Vol. 167, No. 4.
- Nordholt, Henk. S., Purwanto, B. Saptari, R. 2013. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta & Pustaka Larasan.
- Page, S.J. 2009. *Tourism Management: Managing for Change (3th ed.)*. Butterworth Heineman Elsevier, Oxford, UK.
- Pendit, Nyoman S. 1990. *Ilmu Pariwisata; Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Picard, Michel. 2006. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: Gramedia.
- Poerwokoesoemoe, Soedarisman. 1984. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Reddy, M. V., Boyd, S. W., & Nica, M. 2020. Towards a post-conflict tourism recovery framework. *Annals of tourism research*. 84, 102980.
- Republik Indonesia. Daerah Istimewa Jogjakarta. 1953. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Rush, Jamesh (ed). 2013. *Jawa Tempo Doeloe: 650 Tahun Bertemu Dunia Barat 1330-1980*. Depok: Komunitas Bambu.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, dkk. 2017. *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soemardjan, Selo. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu.
- Soewarno, P.J. 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1943-1974; Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata; Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Statistik Pemerintah Daerah Jogjakarta tahun 1958*. Jogjakarta: Sekertariat Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, 1960.
- Sunjayadi, Achmad. 2007. *Vereeniging Toeristen Verkeer Batavia (1908-1942); Awal Turisme Modern di Hindia Belanda*. Depok: FIB UI.
- Sunjayadi, Achmad. 2019. *Pariwisata di Hindia Belanda 1891-1942*. Jakarta: Gramedia.
- Tourism in Nederland Indies, 1929*.
- Tourism in Nederland Indies* Vol. XIII, No.2, 1938.
- Vickers, Adrian. 2011. "Bali rebuilds its tourist Industry", dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 167, No. 4.
- Wahab, Salah. 1992. *Manajemen Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wardiyanto. 2000. *Perkembangan Pariwisata di Yogyakarta Pada Masa Kolonial Belanda 1908–1942*. Tesis tidak diterbitkan pada Program Studi Sejarah Pascasarjana FIB UGM.
- Withington, William A. 1961. "Upland Resorts and Tourism in Indonesia: Some Recent Trends", *Geographical Review*, Vol. 51, No. 3, July.
- Yamamura, Takayoshi dkk (ed). 2022. *War as Entertainment and Contents Tourism in Japan*. New York: Routledge.
- Yoeti, Oka. S. 1996. *Pengantar Ilmu pariwisata. (edisi Revisi)*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Yoeti, Oka. S. dkk. 2006. *Pariwisata dan Budaya*. Jakarta: Pradnya Paramita.